

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

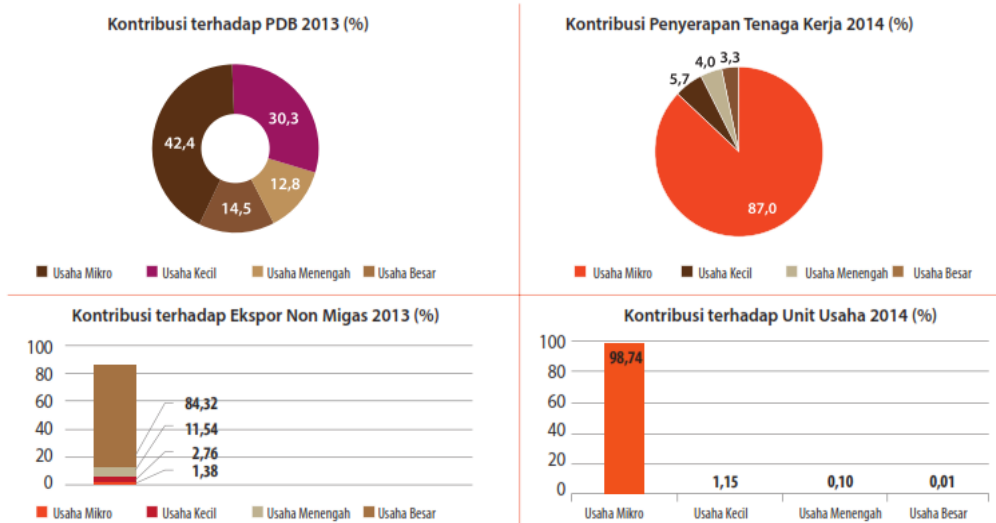


Gambar 1.1 Bendera Negara ASEAN (Sumber: setnas-asean.id)

Seiring perkembangan zaman, ekonomi global berkembang semakin kompleks sehingga memunculkan kesadaran bagi negara anggota ASEAN untuk lebih memajukan ekonomi negara anggota agar ikut bersaing dengan perkembangan ekonomi dunia. Pada akhirnya, dalam menghadapi perkembangan ekonomi global, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan untuk membentuk komunitas ekonomi ASEAN yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dengan nama lain ASEAN Economic Community (AEC). AEC mulai dilaksanakan pada tahun 2015 memiliki ASEAN Economy Community Blueprint 2015 yang berisikan pilar yang merupakan tujuan dibentuknya AEC, yaitu menciptakan kawasan basis produksi dan pasar tunggal yang stabil (pilar pertama), kawasan yang berdaya saing tinggi (pilar kedua), kawasan yang memiliki ekonomi yang terintegrasi dengan mengedepankan pemerataan pembangunan ekonomi (pilar ketiga), dan kawasan yang terintegrasi dengan pasar global (pilar keempat) (Departemen Pengembangan UMKM. Bank Indonesia, 2016).

Dalam melaksanakan pilar ketiga, Salah satu caranya adalah dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) negara ASEAN. UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (UU Nomor 20 tahun 2008). UMKM terdapat di banyak lokasi terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada bahan-bahan lokal dan menjadi penyedia utama barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah. Saking pentingnya, AEC Blueprint 2025 kembali mempertegas peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN. Melalui AEC Blueprint 2025, ASEAN memberikan penekanan baru pada pengembangan dan pemajuan UMKM serta mempersiapkan berbagai program yang lebih terstruktur untuk semakin meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM agar mampu mengambil manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Kemenlu, 2016).

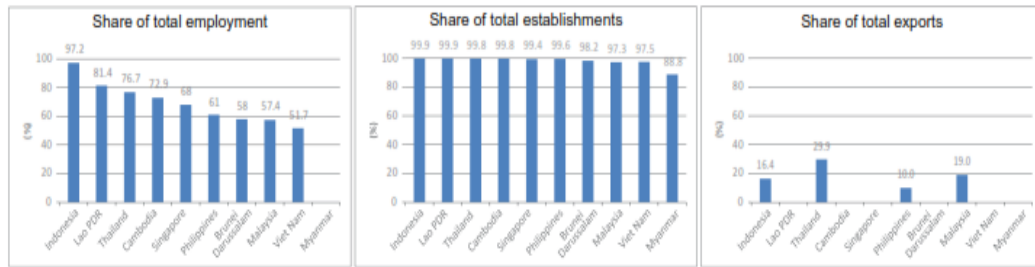
Di Indonesia, UMKM dianggap merupakan salah satu pilar penting perekonomian terutama sebagai penguat perekonomian rakyat (Kemenlu, 2016). UMKM Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, serta tidak bergantung pada hutang luar negeri. Dikutip dari Bank Indonesia, yang menyajikan data dari Kemenkop, pada tahun 2013 UMKM mampu menyumbangkan 5.440 triliun rupiah terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja 114,14 juta orang, menarik 1.655,2 triliun rupiah investasi, dengan total jumlah usaha sebanyak 57,8 juta unit (Kemenkop, 2017). Bila dilihat dari data, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pada tahun 2013 meliputi; 42,4 % berasal dari usaha mikro, 30,3 % dari usaha kecil, dan 12,8 % berasal dari usaha menengah (Gambar 1). UMKM juga mendominasi dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 UMKM mampu menyerap 96,7 persen dari total tenaga kerja nasional.



Gambar 1.2 Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tahun 2013-2014 (Sumber: Bank Indonesia, Dikutip dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014)

Tidak hanya di Indonesia, UMKM juga dianggap oleh negara ASEAN lain sebagai salah satu roda penggerak utama perekonomian mereka. Hal ini dikarenakan negara-negara ASEAN yang memiliki persamaan karakteristik yaitu masih banyak terdapat perekonomian tradisional yang menopang perekonomian nasional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian ASEAN. Jumlah UMKM mencapai 96% dari seluruh perusahaan di ASEAN, serta mampu menyerap tenaga kerja sekitar 50 - 97%. Selain itu, kontribusi terhadap PDB sekitar 30 - 60% dan kontribusi terhadap ekspor mencapai 19 - 31% (Kemenlu, 2016).

Berikut adalah data dari ASEAN SME Policy Index (2014) terkait perbandingan UKM Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lain. Menurut data menunjukkan UMKM Indonesia yang masih kurang dalam hal penghasilan dari ekspor dibanding Malaysia dan Thailand. Ekspor Indonesia hanya sebesar 16,4%, yang dimana berbeda jauh dengan Thailand yang sebesar 29,9%. Data tersebut juga menunjukkan hanya UMKM Indonesia dan beberapa negara ASEAN saja yang jumlah penghasilan dari ekspor masih dapat diidentifikasi yang artinya ekspor UMKM beberapa negara tersebut masih memberikan kontribusi dalam rantai perekonomian global meskipun masih sedikit. ASEAN juga menekankan kurangnya ekspor di dalam kawasan akan menciptakan lingkungan yang tidak kompetitif bagi para pelaku UMKM dan akan menghambat integrasi (ASEAN Secretariat, 2015).



Gambar 1.3 Perbandingan Total Share UMKM ASEAN (Sumber: ASEAN SME Policy Index, ASEAN Secretariat tahun 2014)

Kurangnya daya saing UMKM Indonesia di ASEAN merupakan salah satu motif mengapa Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia aktif dalam ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME). Komite tersebut dibentuk dengan tujuan merancang berbagai kebijakan dan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan UMKM ASEAN (Kemenlu, 2016). Hal ini kemudian diperkokoh dengan ACCMSME membentuk ASEAN Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development (SAP SMED) 2010-2015. Namun, dengan melihat kurangnya daya saing Indonesia terhadap beberapa negara ASEAN dalam jangka waktu berlakunya SAP SMED 2010-2015, SAP SMED perlu diperpanjang agar Indonesia dan negara ASEAN lain yang masih kurang daya saingnya dapat mendapat manfaat yang maksimal dari kebijakan ASEAN tersebut. Oleh karena itu, dalam KTT ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur, ASEAN sepakat untuk melanjutkan Strategic Action Plan for SME Development (SAP SMED) hingga 2016-2025 yang juga sebagai salah satu fokus dalam AEC Blueprint 2025 (ASEAN Secretariat, 2015).

Sebagai suatu proses, pengembangan UMKM di ASEAN akan terus dilakukan dikarenakan ASEAN bertujuan untuk memajukan integrasi ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Untuk lebih lanjut, SAP SMED dibuat dengan memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut (ASEAN Secretariat, 2015):

- 1) Mempromosikan produktivitas, teknologi, dan inovasi yang dimiliki UMKM.
- 2) Meningkatkan akses keuangan para pelaku UMKM.
- 3) Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi agar UMKM dapat bersaing secara global.

- 4) Meningkatkan kebijakan dan lingkungan peraturan dalam pengembangan UMKM.
- 5) Mempromosikan kewirausahaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu tujuan strategis tersebut adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan terkait SDM memang sudah lama menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan SDM di Sumatera Utara. Menurut Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza mengatakan UMKM Sumatera Utara menghadapi masalah yang banyak dialami UMKM ASEAN yaitu kurangnya kualitas SDM karena peningkatan mutu dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Beberapa faktor penyebab kurangnya kualitas SDM di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan sedikitnya pelaku usaha yang memiliki pendidikan tinggi, yang didominasi oleh pendidikan rendah (SD Kebawah) (wawancara dengan Pak Riza, 2020).

Pendidikan rendah terbanyak karena dipengaruhi oleh kemiskinan (kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kualitas kesehatan dan kriminalisme). Kemiskinan menjadi musuh utama Bangsa Indonesia. Tahun 1999 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,43% atau setara dengan 47,97 juta penduduk. Setelah 20 tahun, angka kemiskinan tersebut mampu ditekan menjadi 9,82% (Maret 2018, yang merupakan titik terendah kemiskinan sepanjang sejarah. Begitu juga dengan Sumatera Utara, sejak September 2017, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai satu digit. Jadi dapat dipastikan faktor tersebut menyebabkan UMKM Sumatera Utara masih memiliki SDM yang kurang berkualitas sehingga tidak mampu menguasai pasar global. Penyebab lainnya yaitu kualitas kesehatan yang kurang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan (wawancara dengan Pak Riza, 2020).

Kualitas SDM pelaku UMKM di Sumatera Utara bisa dibilang masih rendah dikarenakan sekitar 60% dari total pelaku UMKM yang ada hanya mendapat pendidikan hingga bangku SMP, ada juga yang mampu duduk di bangku sarjana, hanya saja jumlahnya tidak seberapa, hanya sekira 5% hingga 10% (medanbisnisdaily.com, 2013). Yang mendapat pendidikan juga sangat sedikit yang mampu berbahasa inggris (BKAP DPR RI, 2016). Hal ini menjadi masalah

dikarenakan UMKM Indonesia sudah dihadapi dengan AEC yang dimana merupakan langkah awal untuk memasarkan produknya di pasar global yang dimana penggunaan bahasa Inggris adalah keharusan. Selain rendahnya kualitas SDM, UMKM Sumatera Utara juga mengalami beberapa permasalahan seperti rendahnya inovasi dan distribusi produk UMKM, rendahnya kualitas bahan baku, serta keterbatasan akses permodalan (BKAP DPR RI, 2016).

I.2. Rumusan Masalah

Meningkatkan daya saing UMKM merupakan salah satu upaya ASEAN dalam memajukan integrasi ekonomi kawasan. Namun bila dilihat dari data, masih terlihat Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain yang masih kurang daya saingnya dengan Thailand dan Malaysia. Di sisi lain, ASEAN memiliki program ASEAN Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development (SAP SMED) 2012-2015, yang kemudian dilanjutkan menjadi SAP SMED 2016-2025. SAP SMED ini diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas UMKM agar dapat bersaing dengan UMKM negara ASEAN lainnya. Penerapan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan dan kegiatan-kegiatan pada tingkat ASEAN dan nasional yang bersinergi dengan konsep pelaksanaan SAP SMED. Salah satu daerah yang masih rendah kualitas UMKM adalah Sumatera Utara, oleh karena itu penulis mengambil perumusan masalah **“Bagaimana penerapan program Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development untuk meningkatkan kualitas UMKM Indonesia sebagai bagian dari ASEAN Economic Community tahun 2016-2019 (studi kasus: UMKM Sumatera Utara)?”**

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan penerapan program Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development untuk meningkatkan kualitas UMKM Indonesia sebagai bagian dari ASEAN Economic Community tahun 2016-2018 yang mengambil contoh kasus UMKM Sumatera Utara.

I.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Untuk kedepannya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan mengenai keadaan Indonesia dalam AEC.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan mengenai perkembangan UMKM Indonesia, terutama di provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis utama penelitian ini yaitu menyajikan informasi dalam bentuk tertulis atau tabel berkaitan dengan penerapan program Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development oleh Indonesia terutama di provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan UMKM sebagai bagian dari AEC.
- 2) Untuk waktu yang akan datang penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di dalam AEC.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembabakan atau sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu penelitian dikarenakan sistematika pembabakan memberikan gambaran secara garis besar suatu penelitian. Dalam makalah ini, sistematika pembabakan menjelaskan secara singkat isi dari tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan beberapa sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah yang memberikan gambaran umum mengenai latar belakang kondisi UMKM Indonesia dan negara ASEAN, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari literature review yang berisikan tinjauan literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang sudah dilakukan sebelumnya, dan teori dan konsep yang akan digunakan untuk

menjelaskan penelitian ini. Teori dan konsep yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah teori atau konsep SAP SMED dan konsep daya saing nasional (national competitiveness). Di bab ini juga terdapat alur berpikir yang merupakan alur penelitian secara garis besar, dan asumsi sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bab metode penelitian dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian

BAB IV PERKEMBANGAN UMKM NEGARA ASEAN SEBELUM BERLAKUNYA SAP SMED 2016-2025

Merupakan bagian pembahasan yang akan menjabarkan dan menganalisa mengenai perkembangan UMKM di ASEAN sebelum berlakunya SAP SMED 2016-2025. Perkembangan meliputi bagaimana perkembangan UMKM di beberapa negara ASEAN, bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia dan di Provinsi Sumatera Utara. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu Perkembangan UMKM negara ASEAN, Perkembangan UMKM Indonesia, dan Perkembangan UMKM Sumatera Utara.

BAB V PENERAPAN KEBIJAKAN YANG BERSINERGI DENGAN SAP SMED 2016-2025 DI INDONESIA

Merupakan bagian pembahasan yang akan menjabarkan bagaimana penerapan SAP SMED 2016-2025 bersinergi dengan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN, Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam kurun waktu 2016-2019. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kinerja UMKM yang diterapkan di Indonesia dan di Provinsi Sumatera Utara yang bersinergi dengan konsep penerapan SAP SMED 2016-2025.

BAB VI PENUTUP

Merupakan penutup, yang berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil analisa yang dirangkum dari pembahasan penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran-saran bagi pihak lain yang dapat menjadi beberapa masukan di kemudian hari.